

TANTANGAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

Oleh :

Sumitro

*Dosen Prodi Manajemen Informatika, AMIK Labuhanbatu
Rantauprapat, Medan; sumitro@gmail.com*

Abstract

Keunggulan suatu produk di masa datang akan sangat dipengaruhi oleh konsistensi kualitas yang prima dan terjaga, kontinuitas delivery yang tepat, serta harga yang relatif murah. Kesemuanya ini hanya akan bias dicapai apabila sistem produksi dengan faktor penunjangnya mempunyai penampilan yang baik dan mampu memanfaatkan derap dunia ke arah multi-sourcing untuk mencari sumber bahan dan dana yang paling murah dan efisien. Hal ini diterjemahkan kedalam bentuk dunia kerja masa depan yang menarah kepada system pengembangan sumber daya manusia yang bersifat fleksibel, mempunyai keahlian beragam (multi-skills), dan terus mempersenjatai diri dengan pengetahuan baruh (life long education).

Sama halnya dengan sumber daya lainnya yang terbatas, maka keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan tertentu yang menguasai teknologi untuk sementara diatasi dengan mengizinkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Di tengah-tengah sempitnya lahan kerja dan menumpuknya angkatan kerja, sampai dengan tahun 1995, Indonesia menampung TKA sebanyak kurang lebih 57.159 orang, dengan penempatan kerja di berbagai bidang dalam perusahaan, terutama untuk swasta dan investor asing melalui izin yang diberikan BKPM.

Jelas bahwa peningkatan kompetensi profesi bukan hanya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, akan tetapi juga akan memperbaiki pemerataan pendapatan sehingga memungkinkan terciptanya sustainable development.

Kata Kunci : perdagangan, tantangan, liberalisme

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keunggulan suatu produk di masa datang akan sangat dipengaruhi oleh konsistensi kualitas yang prima dan terjaga, kontinuitas delivery yang tepat, serta harga yang relatif murah. Kesemuanya ini hanya akan bias dicapai apabila sistem produksi dengan faktor penunjangnya mempunyai penampilan yang baik dan mampu memanfaatkan derap dunia ke arah multi-sourcing untuk mencari sumber bahan dan dana yang paling murah dan efisien. Hal ini diterjemahkan kedalam bentuk dunia kerja masa depan yang menarah kepada system pengembangan sumber daya manusia yang bersifat fleksibel, mempunyai keahlian beragam (multi-skills), dan terus mempersenjatai diri dengan pengetahuan baruh (life long education). Untuk itu dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus informasi yang berkembang sangat pesat perlu diantisipasi dengan sikap yang proactive dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, yang dinamis dan tanggap terhadap setiap perubahan tersebut sehingga memiliki kemampuan

memberi jawaban yang tepat dan cepat pada kebijakan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. Namun demikian, kemampuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan Indonesia untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu tumbuh terlihat relatif sangat lambat. Yang lebih menyedihkan lagi, di tengah membesarnya deficit transaksi jasa, hingga saat ini kita belum mampu mempersiapkan TKI yang mampu memasuki pasar kerja tenaga trampil di manca negara yang akan mengurangi defisit transaksi jasa tersebut. Padahal Filipina berhasil memperoleh lebih dari US\$ 4 miliar pada tahun 1995, dan hingga pertengahan 1996 telah menghasilkan devisa US\$ 3,5 milyar sehingga diperkirakan pada tahun 1996 akan mendekati US\$ 7 milyar dari hasil repatriasi tenaga kerja mereka diluar negeri (BI dan IMF, 1996).

Sama halnya dengan sumber daya lainnya yang terbatas, maka keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan tertentu yang menguasai teknologi untuk sementara diatasi dengan

mengizinkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. ditengah-tengah sempitnya lahan kerja dan menumpuknya angkatan kerja, sampai dengan tahun 1995, Indonesia menampung TKA sebanyak kurang lebih 57.159 orang, dengan penempatan kerja di berbagai bidang dalam perusahaan, terutama untuk swasta dan investor asing melalui izin yang diberikan BKPM.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran TKA di Indonesia membawa berbagai dampak positif terhadap kemampuan ekspor Indonesia. antara lain: (i) keterampilan baru dengan kemungkinan alih teknologi ke tenaga kerja Indonesia (TKI), (ii) pengetahuan pasar luar negeri; dan (iii) kemampuan negosiasi dengan pedagang atau industriawan luar negeri terutama usaha kecil menengah yang umumnya kurang memiliki informasi dan kemampuan lobbying. namun terdapat pula berbagai dampak negatif seperti : (i) hilangnya devisa negara; (ii) timbulnya berbagai eksese kebudayaan dan sosial, dan (iii) hilangnya kesempatan kerja TKI apabila alih pengetahuan dan ketrampilan tidak terwujud,

Terlepas dari dampak keberadaan TKA di dalam negeri, fenomena ini dapat dilihat sebagai suatu gambaran akan adanya kebutuhan perusahaan terhadap tenaga-tenaga ahli, terlatih dan terampil, yang kemampuannya belum dimiliki oleh TKI. Atau dengan kata lain adalah adanya ketidakmampuan dari TKI untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan tertentu.

Kenyataan tersebut merupakan suatu tantangan berat yang perlu di hadapi dengan adanya liberalisasi perdagangan barang dan jasa pasca putaran Uruguay, dimana liberalisasi perdagangan akan semakin menyemarakkan arus pergerakan tenaga kerja antara negara. maka dalam rangka menghadapi era globalisasi – yang mau tidak juga melibatkan adanya perdagangan tenaga kerja secara global—maka tidak bias tidak, pengembangan sumber daya manusia Indonesia harus ditangani secara mendasar. sumber daya manusia Indonesia yang unggul diperlukan untuk dapat bersaing menghadapi permintaan pasar tenaga kerja nasional maupun internasional.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana tantangan liberalisasi perdagangan.

II. LANDASAN TEORITIS

2.1. Unit Usaha Sebagai Pemicu Alih Teknologi Dan Alih Ketrampilan

Data historis di berbagai negara yang mengalami pertumbuhan industri yang pesat seperti

misalnya Inggris pada era revolusi industri yang pesat seperti misalnya Inggris pada era revolusi industri di abad 18, Amerika pada akhir abad 19, Jepang pada tahun 1960'an, serta industrializing countries pada tahun 1970'an menunjukkan bahwa percepatan kemajuan industri mereka pada awalnya bertopang pada kemampuan memanfaatkan dan menekan biaya tenaga kerja, bahan baku, dan energy yang murah. namun demikian, secara berangsur struktur ekonomi dunia mengalami perubahan yang sifatnya fundamental. faktor pertama yang paling signifikan adalah kenyataan bahwa industri-industri yang bertopang pada murahnya tenaga kerja, bahan baku serta energi sudah mulai kehilangan daya saing di pasaran dunia. faktor kedua adalah terlihatnya kecenderungan yang terus meningkat dari biaya tenaga kerja dengan semakin langkanya jenis tenaga kerja tertentu akibat kemajuan teknologi. dan yang terakhir adalah semakin meningkatnya perselisihan dagang akibat semakin banyaknya pemain di pasar dunia. masalah lainnya yang sering timbul adalah tidak setaranya tingkat kemajuan teknologi antar negara, antar perusahaan dan antar kawasan di berbagai belahan bumi ini. menyamakan playing field bukan saja merupakan tugas negara berkembang yang tertinggal di dalam kecanggihan teknologi produksi, teknik pemasaran, sumber daya manusia yang profesional dan terampil, serta sumber dana yang terbatas, namun semakin disadari bahwa negara maju juga mempunyai kepentingan yang sama besarnya. oleh sebab itu, didalam kerangka memanfaatkan murahnya faktor produksi di negara berkembang, maka sejak pertengahan 1970an terjadi relokasi industri dari negara Amerika dan Jepang ke negara-negara Singapura, Korea, Taiwan dan Hong Kong, yang telah berhasil memanfaatkannya dengan baik sehingga mereka sendiri menjadi negara industrializing countries gelombang pertama.

Relokasi industri demikian umumnya mencakup suatu tujuan untuk menjadikan negara yang relative murah biaya buruhnya menjadi pemasok bagi jaringan industri produk akhir perusahaan MULTI NATIONAL COMPANIES (MNCs) di manca negara, sehingga sering terlihat suatu pola keterkaitan (interlinkages) antara industri besar milik MNCs dengan industri kecil dan menengah milik penduduk setempat. kedalaman keterkaitan – apakah hanya sekedar alih teknologi dasar dan mekanikal atau mencapai alih teknologi proses – sangat tergantung dari kemampuan perusahaan domestik di dalam menyerap dan merebut teknologi tersebut. namun tidak kalah pentingnya adalah kemampuan masing-masing perusahaan untuk dapat menyerap ketrampilan baru serta

mengerti manajemen produksi dan pengawasan yang diterapkan untuk menghasilkan produk yang konsisten kualitasnya (ZERO DEFECT) dan dan tepat waktu penyelesaiannya (TIMELY DELIVERY).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa dunia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi negara yang tergantung hanya pada komoditi primer.pengaruh ini semakin kompleks karena factor-faktor politik dan non-ekonomi lainnya,di mana umumnya negara produsen komoditi primer lebih rawan terhadap permainan politik negara adidaya.sementara hamper semua negara berusaha untuk dapat memasuki era produsen dan eksportir barang manufaktur yang memiliki nilai tambah lebih tinggi,persainagn semakin ketat akibat adanya kuota dan berbagai jenis hambatan non-tarif lainnya.jelas terlihat bahwa perubahan pasar ke arh persaingan yang makin ketat mengharuskan setiap unit ekonomi memperhitungkan dengan baik perilakunya agar tetap bias memainkan perannya. Bagi dunia usaha,masalah yang terpenting tampaknay adalah bagaimana meningkatkan efesien dan produktivitas produksi di dalam kancah persaingan yang semakin ketat.seperti di ungkapkan djisman dan Miranda (1994),terlepas dari apakah keunggulan komparatif berbeda substantive dari keunggulan kompetitif,unit bisnis harus tetap bersaing di pasar yang pada gilirannya cenderung semakin global.semakin kuat suatu ekonomi bertumpu atas mekanisme pasar seperti terjadi sesudah deregulasi dan swastanisasi di banyak sekali negara dalam 1980 an dan awal 1990 an,semakin penting daya saing unit bisnis bagi keberhasilan pembangunan suatu negara.yang bersaing di pasar amerika serikat,eropa barat,jepang,ASEAN dan pasar-pasar lain di dunia bukanlah negara,pemerintah atau kelompok usaha yang kita kenal di Indonesia sebagai konglomerat,melainkan unit-unit bisnis.yang bersaing melawan general motors (GM) bukanlah pemerintah jepang atau kerestsu mitsui,melainkan Toyota motors.karena itu,teknologi sebagai faktor sukses dalam persaingan perlu di kaji pada tingkat unit bisnis.demikian pula halnya pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor dasar bagi daya saing jangka panjang,perlu dilihat dari sudut kebutuhan bisnis itu sendiri.ini tidak berarti bahwa kebijakan teknologi pemerintah dan strategikorporat tidak relevan bagi daya saing.mereka termasuk dalam faktor-faktor penting yang mempengaruhi perilaku teknologikal dari unit bisnis.pemerintah juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjadi fasilitator bagi

tersedianya sumber daya manusia yang hamper siap pakai,dengan memanfaatkan dana dan fasilitas pelatihan yang tersedia semaksimal mungkin, berdasarkan suatu strategi yang matang yang didasarkan atas suatu penelaahan mendalam mengenai kebutuhan dunia usaha yang dinamis.

Sementara itu, keberhasilan Pembangunan ekonomi dan sosial ya ng kita capai dengan sendirinya telah meningkatkan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.kemampuan untuk menghitung perubahan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.kemampuan menghitung perubahan aspirasi dan ekspektasi masyarakat sebagai akibat kemajuan yang dicapai selama ini, merupakan kunci yang muncul sebagai akibat globalisasi produksi ,teknologi dan finansial,dimana batas- batas fisiksuatu negara semakin kurang penting,perlu diantisipasi secara tepat.perubahan yang terus menerus dan terjadi secara simultan diberbagai bidang ,terutama dalam industri informasi dan telekomunikasi menimbulkan gelombang dinamika yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal di masa-masa lalau. Semakin singkatnya product life cycle berbagai kelompok industri merupakan contoh yang paling nyata dari betapa cepatnya detak waktu di dalam era globalisasi ini.kemajuan teknologi produksi yang sangat pesat sehingga mempersingkat daur hidup produk suatu barang telah merubah secara total strategi perusahaan didalam mempertahankan eksistensinya di dunia internasionaI yang penuh persaingan ketat.ditopang dengan kemajuan teknologi produksi yang sangat pesat sehingga mempersingkat daur hidup produk suatu barang telah merubah secara total strategi perusahaan di dalam mempertahankan eksistensinya di dunia internasional yang penuh persaingan ketat. Di topang dengan kemajuan teknologi komunikasi yang bertumbuh secara eksponensial, tidak pelaklagi ke dua faktor ini merupakan pemicu terjadinya [ercepatan globalisasi perekonomian dunia yanggaungnya semakin lama semakin kencang dan itense. Untuk itu di butuhkan unit – unit ekonomi yang mampubergerak dengan fleksibel dan cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang berhasil dalam perekonomian adalah negara yang berhasil mendorong dan mempertahankan exsistensi perdagangannya dengan cepat ini berarti, setiap pelaku bisnis di tantang untuk dapat mengidentifikasi dan memaksimisasi keunggulan yang di milikinya pada waktu yang tepat. Pengaruh globalisasi di hamper segala bidang yang membuat dunia ini semakin borderless mengindikasikan bahwa hingga akhir abad ke – 20

ini, sukses atau tidaknya pembangunan suatu negara akan sangat tergantung pada kemampuan negara tersebut dalam persaingan di pasaran global. Oleh sebab itulah, Indonesia yang merupakan suatu negara kecil dalam perdagangan internasional, sangat berkepentingan dalam ikut membentuk dan melaksanakan asas-serta aturan-aturan perdagangan multilateral yang tercakup dalam general agreement on tariff and trade (GATT).

Jelaslah bahwa perlu usaha yang bersungguh-sungguh - baik dari pemerintah maupun unit usaha - untuk memperbaiki daya saing internasional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi persaingan yang fair, serta menghapus sumber penyebab distorsi yang menghambat efisiensi produksi. Tapi seperti dikemukakan di atas, tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan serana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam rangka menyongsong era teknologi tinggi demi peningkatan daya saing.

Dalam bidang manufaktur misalnya, teknologi berkembang sedemikian cepatnya sehingga keahlian dan pengetahuan tenaga kerja akan ikut cepat usang. Dalam bidang perdagangan, semakin rumitnya teknik perdagangan, teknik negosiasi, strategi pemasaran, strategi promosi, maupun sekelompok aturan main yang baru dibuat yang dengan mudah membuat suatu perusahaan tergelincir dalam persaingan. Dalam bidang keuangan, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai bentuk lembaga pembiayaan, instrumen pembiayaan, sehingga peran lembaga keuangan bukan hanya sebagai intermediation of funds melainkan intermediation of information, sehingga berperan bukan hanya sebagai banker tetapi juga sebagai konsultan dalam berbagai produk jasa keuangan tradisional (*Deposito Dan Kredit*) maupun produk mutakhir (*Swaps, Derivatives, Sekuritas, Dan Lain-Lain*). Jelas bahwa untuk itu setiap pekerja perlu dilengkapi dengan pengetahuan tambahan yang canggih dan terus dikembangkan, serta keahlian yang dipunyai untuk melakukan penetrasi dan mengenal pasaran yang akan dituju.

Perbaikan ekonomi secara keseluruhan dalam produktivitas dan efisiensi akan sangat penting artinya dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Meningkatnya permintaan buruh serta reformasi ekonomi yang sangat agresif di negara berkembang lainnya dapat mengikis daya saing Indonesia dalam produk yang pada karya, sehingga perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk memperbaiki penggunaan teknologi yang

menghasilkan nilai tambah produksi yang lebih tinggi. Kompetensi profesional merupakan kunci daya saing dalam era percepatan kemajuan teknologi secara eksponensial seperti yang menjadi kecenderungan akhir-akhir ini.

2.2. Tantangan Pengembangan Sdm Dan Profesionalisme

Perubahan kebijakan pengembangan unit usaha yang dilaksanakan dengan mengacu pada konsep mekanisme pasar, apalagi dalam bentuk pasar dengan persaingan yang tinggi akibat globalisasi, mau tidak mau harus diikuti dengan perubahan-perubahan pengelolaan unit usaha itu sendiri. Penerapan konsep profesionalisme pada unit usaha swasta maupun pemerintah merupakan fenomena mutakhir yang tidak terhindarkan. Namun demikian, pengadaan tenaga pelaksana profesional sampai dengan tingkat manajer menengah tampaknya masih perlu diperhatikan. Bukan saja tenaga profesional yang handal yang menguasai ketrampilan pengelolaan berbagai manajemen pemasaran, produksi dan lain-lain yang paling mutakhir, namun tenaga profesional yang mempunyai kepribadian (character) dan dedikasi yang besar serta jujur masih merupakan kelangkaan dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh dunia swasta saat ini. Mungkin faktor ini pula yang menimbulkan keengganan perusahaan untuk mengeluarkan biaya untuk menidiki dan melatih tenaga kerja mereka, karena masih kurangnya loyalitas serta tidak berfungsinya perangkat hukum yang berlaku untuk para pekerja yang mengingkari perjanjian ikatan kerja mereka.

Pengadaan tenaga profesional yang handal tidak dapat seluruhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal yang ada, melainkan tidak kalah pentingnya perencanaan sumber daya manusia didalam dunia usaha itu sendiri.

Bagi unit usaha yang beroperasi di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki sumber alam dan penduduk yang relatif menimpah, maka urgensi kemajuan teknologi sebagai sumber pertumbuhan sering belum terlalu terasa kuat. Perusahaan masih dapat mengandalkan deplesi sumber-sumber yang cukup besar walaupun harus membayar impor teknologi yang besar. Namun semakin lama semakin disadari bahwa suatu waktu sumber-sumber ini akan terkuras juga, seperti halnya yang terjadi di Jepang pada awal gelombang relokasi di tahun 1970'an, dan NIE's (Korea, Taiwan, Singapura dan Hong Kong) pada gelombang relokasi 1980'an. Yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa persentase sumbangan sumber alam dalam nilai informasi, disain dan

distribusi sebagai kesatuan komponen biaya produksi semakin lama semakin mengecil. hal ini tampak jelas dalam impor total OECD dimana pangsa SITC 0-4 terus menurun sementara pangsa SITC 7 - - dimana terpusat produk-produk industri teknologi tinggi - - terus meningkat. cerita sukses dari usaha diversifikasi ke produk yang bernilai tambah lebih tinggi berkorelasi lebih kuat dengan kegiatan inovatif langsung daripada hanya dengan usaha-usaha pendidikan, baik secara formal maupun informal. dalam globalisasi perdagangan dan investasi dunia yang diwarnai kuat oleh keragaman teknologi, keunggulan bersaing dari unit usaha suatu negara bertumpu kuat pada kemampuan diferensiasi yang bermula dari keunggulan teknologi. tanpa kemampuan diferensiasi, suatu perusahaan hanya dapat menikmati bagian kecil dari perdagangan intra-industri yang justru tumbuh progresif dibanding perdagangan antar-industri.

Oleh karena itu, tepatlah kiranya pendapat yang mengatakan bahwa usaha meningkatkan kemampuan teknologi terpusat kembali kepada dunia bisnis sebagai unit pelaksana produksi. dari segi usaha bisnis, agar tingkat teknologi dari suatu perusahaan dapat mencapai tingkat teknologi maju perlu direalisasi investasi yang dibutuhkan. dalam setiap model investasi, terdapat firm-specific investment dan firm-specific capital, yang besar kecilnya tidak terlepas dari tingkat teknologi yang berkembang di dunia atau di negara kita. Besarnya firm-specific investment yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk merealisasikan peningkatan tertentu dari tingkat teknologinya tergantung dari tingkat teknologi yang dimilikinya saat ini relative terhadap tingkat teknologi yang tersedia di dunia. Dan kemampuan meningkatkan daya saing dari suatu industri dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Sebagian diantaranya - - seperti misalnya lingkungan ekonomi makro dan sistem hukum dan peraturan berusaha - - merupakan unsur yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal dalam bertarung menurut pangsa dunia. berbagai faktor internal seperti - - lainnya seperti misalnya kemahiran rekayasa dan efektivitas dalam menterjemahkan inovasi teknis kedalam keunggulan pasar - - merupakan unsur yang komplementer sifatnya merupakan faktor utama bagi efisiensi usaha. Dan karena persaingan swasta merupakan ujung tombak untuk merebut pangsa pasar dunia, maka keberhasilan dalam mempraktekan rekayasa dan menggunakan seluruh dan kemungkinan inovasi yang tersedia merupakan salah satu faktor yang dominan dalam menentukan daya saing industri suatu negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha pendidikan tanpa meningkatkan kemampuan inovatif dari dunia usaha akan mengurangi tingkat kepesatan peningkatan keunggulan bersaing. ini berarti, di dalam desain pendidikan dan pelatihan - - formal maupun non-formal - - perlu diberi muatan yang dapat menggugah inner capability dari para manager dan engineers untuk menyadari pentingnya sikap inovatif didalam menerapkan ilmu dan pelatihan yang diperoleh.

Masalah peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi semakin penting artinya mengingat bahwa globalisasi ekonomi juga berarti bahwa faktor-faktor produksi akan mudah bergerak antar negara. Bilamana kebutuhan tenaga terdidik dan profesional tidak dapat dipenuhi oleh tenaga Indonesia, maka agar tidak menghambat pembangunan, kebutuhan tersebut perlu diisi oleh tenaga-tenaga dari luar Indonesia. hal ini sudah kita alami saat ini, namun imbasnya akan terasa semakin kuat pada saat perjanjian general agreement on trade in services nantinya sudah berfungsi penuh sementara kita belum siap. data yang tersedia menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja asing bukan hanya terjadi dalam jumlahnya melainkan juga bertambah jenis pekerjaan dan jabatan sebagai konsekuensi dari otonomi ekonomi yang pesat. sebagai contoh, jumlah jenis jabatan yang diizinkan untuk diisi oleh tenaga kerja asing pendatang pada tahun 1980/81 hanya sejumlah 1.298 jenis jabatan, dan dalam sepuluh tahun telah naik dua kali lipat menjadi 2.636 jenis jabatan pada tahun 1990/91; atau meningkat dengan rata-rata 7,3% per tahun. kenaikan jenis jabatan yang diizinkan ini menunjukkan masih dan semakin banyaknya jenis jabatan yang belum mampu diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Meskipun tidak dapat diingkari bahwa kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik lainnya juga telah meningkatkan pada periode tersebut - - dimana jumlah jenis jabatan yang tertutup bagi tenaga kerja asing pendatang juga meningkat dari 1.050 jenis jabatan pada tahun 1980/81 menjadi 1.692 jenis jabatan pada tahun 1990/91 - - namun penambahan kemampuan ini berjalan lebih lambat dari jenis yang dibutuhkan, yakni hanya mengalami kenaikan rata-rata 4,9% per tahun. kesenjangan ini perlu ditutup secara bertahap dengan melakukan pelatihan yang tepat guna pada waktu yang dibutuhkan. ini berarti, antisipasi yang harus dilakukan bukan hanya untuk menentukan strategi bagaimana menggantikan tenaga asing, akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah mengidentifikasi jenis keahlian seperti apa saja yang harus disediakan sejalan dengan kemajuan teknik perdagangan yang akan timbul dimasa

dating, bahkan, tidak terlalu muluk untuk juga mulai mempersiapkan tenaga kerja professional Indonesia di dalam bidang perdagangan dalam rangka mengurangi kesenjangan deficit neraca jasa.

Untuk setiap jenis jabatan di berbagai sector yang saat ini masih diisi tenaga kerja asing, dibutuhkan kompetensi atau kemampuan pokok tertentu, yang dapat disederhanakan sebagai berikut:

- a. kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat. dengan perkataan lain, dibutuhkan kemampuan tinggi dalam mengidentifikasi permasalahan, kekuatan, tantangan dan peluang usaha.
- b. kemampuan teknis untuk memperdagangkan produk Indonesia, baik di dalam negeri dalam rangka persaingan terhadap barang impor, maupun di pasar dunia dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas kita.
- c. kemampuan social untuk bekerjasama dalam satu tim kerja yang merupakan mata rantai perdagangan, yakni unit produksi, unit distribusi, unit promosi dan unit transportasi.

Hal ini menjadi teramat penting, karena di dalam era globalisasi, jaringan kerja dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk strategi alliances merupakan suatu keharusan, a must. Kesemuanya itu perlu ditekuni dengan baik yang didasarkan atas kesadaran bahwa keunggulan daya saing terletak pada komitmen untuk menghasilkan barang dan jasa yang konsisten mutunya pada waktu yang tepat sesuai dengan perjanjian perdagangan yang telah dibuat. ini juga berarti bahwa teknologi yang digunakan harus berada di frontier serta ketrampilan yang dimiliki secara berkesinambungan harus ditingkatkan.

Dalam rangka penetrasi ke pasar internasional bagi komoditi ekspor non-migas khususnya barang manufaktur salah satu faktor terpenting adalah memenuhi syarat kualitas, disain dan waktu penyerahan seperti yang diinginkan oleh pasar yang dituju. dalam hal ini, bantuan tenaga kerja asing yang lebih mengenal pasar internasional merupakan jalan pintas yang akan menguntungkan para produsen. sama halnya seperti manfaat yang terkandung dalam investasi asing langsung (foreign direct investment) yang bukan hanya membawa serta dana serta teknologi produksi, namun yang terlebih penting lagi adalah foreign direct investment membawa serta didalamnya tenaga kerja ahli yang mengenal dengan baik teknologi produksi barang tersebut, serta akses ke pasar internasional. namun yang penting untuk tetap diingat adalah pengguna tenaga kerja asing ini,

selain mahal juga merupakan pemborosan devisa negara. OLEH karena itu sifat penggunaan tenaga kerja asing seyogyanya hanya bersifat sementara saja. proses alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia hanya bias dilakukan apabila tersedia tenaga kerja Indonesia yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan sebagai pengganti tenaga kerja asing.

Untuk itulah perlunya dilakukan pelatihan yang berkelanjutan agar terlaksana peningkatan ketrampilan dan pengetahuan tenaga kerja Indonesia yang akan menggantikan tenaga kerja asing. kalau kita pelajari bagaimana peran anggota suatu keiretsu di Jepang berhubungan melalui pemilikan silang daripada pemilikan tunggal dan secara sendiri-sendiri mempunyai bisnis-bisnis yang terbatas, dimana masing-masing anggota ini juga mempunyai hubungan kontrak dengan sejumlah besar pemasok; maka akan semakin jelas betapa kemampuan untuk mempelajari kiat yang dilakukan negara lain akan sangat membantu usaha peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia di bidang produksi dan perdagangan.

Meskipun jelas unit usaha sangat berkepentingan mengenai pelatihan bagi pekerjanya, namun berbagai penelitian yang ada menunjukkan bahwa pelatihan yang intensif masih terpusat pada tingkat ketrampilan bagi pekerja senior yang bahkan sering memperoleh latihan di luar negeri. sedangkan bagi operator dan bekerja produksi unskilled dan semi-skilled sangat terbatas pelatihan yang diberikan. seperti digambarkan Hall (1995) berdasarkan survai yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 1989/90 dengan mengambil sampel 142 perusahaan manufaktur di berbagai daerah di Indonesia, terlihat betapa lebih dari setengah (51 %) dari sampel 1 985 pekerja pada tingkat ketrampilan menengah dan tingkat supervisi tidak memperoleh pelatihan. on-the-job watching atau taching merupakan kasus terbanyak (88%) dan hanya 2 persen yang menerima off-plant training. tabel 1 dibawah ini menggambarkan betapa bagi jenis TKI yang dibahas pada tulisan ini, sangat kecil kemungkinan pelatihan mendasar yang akan diberikan oleh perusahaan.

Keterbatasan dana pemerintah untuk mengadakan pelatihan bukan merupakan rahasia umum, namun pemanfaatan maksimal dari dana serta fasilitas yang terbatas juga tampaknya belum dicapai. dengan keterbatasan yang ada, pada dasarnya, peranan minimal yang bias dilakukan pemerintah dalam pengadaan informasi teknologi dan menunjang pengadaan pool tenaga kerja bermutu dan hampir siap pakai bias sangat

sederhana dan tidak langsung, seperti misalnya sebagai clearing house atau sebagai konsultan.

TABEL 1. Pelatihan tenaga trampilan dan supervisi di perusahaan manufaktur diperusahaan manufaktur di indonesia 198-90 (dalam %)

	Pelatihan di pabrik sendiri				Di luar pabrik	Total
	sebelum pelatihan	durasi on-the-job	diperoleh on-the-job	diluar waktu kerja		
Operator trampil (n=847)	44.4	7.2	42.3	4.9	1.4	100
Bagian Pemetaan (n=433)	20.6	6.7	20.7	1.6	1.4	100
Supervisi/teknisi (n=703)	47.7	11.3	33.9	4.1	2.9	100
Total (n=1983)	31.3	8.1	34.6	3.8	1.9	100

A. SEBAGAI CLEARING HOUSE

Memberikan intensitas persaingan local meningkat sebagai pasangan kebijakn industrial, pemerintah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam riset dan pengembangan teknologi melalui promosi komunikasi antara peserta-peserta, seperti di singgung di depan, satu perusahaan tidak dapat menguasai semua aspek suatu teknologi lebih baik daripada semua pesaingnya. Dalam banyak hal, kapasitas dari berbagai perusahaan perlu digabung untuk memperbaiki peluang sukses, jika harus mencari dari satu perusahaan ke perusahaan lain, biaya komunikasi pengembangn teknologi tampaknya akan menjadi prohibitif. dalam kaitan ini pemerintah dapat berperan sebagai clearing house, walaupun tidak sebagai fasilitator hubungan antara bisnis dan pusat-pusat lain, terutama yang didanai pemerintah.

B. Sebagai Konsultan

Lebih aktif lagi adalah peran konsultatif yang dapat dimainkan oleh pusat riset pemerintah dalam melayani bisnis. untuk Indonesia, keterlibatan pemerintah dan pusat-pusat penelitian yang disponsori dalam inovasi teknologi baruh dalam sector pertanian pangan dan kesehatan dasar kiranya perlu dipelajari sejauh mana dapat membantu dalam perumusan peran yang tepat dalam mendorong bisnis untuk merebut kemampuan-kemampuan teknologikal. Tentu saja peran ini lebih cocok pada tahap pra-kompetitif. Jelaslah peranan pemerintah yang sedemikian ini perlu diseberluaskan kepada para pengusaha agar mereka dapat menarik manfaat dari padanya, dengan melalui suatu program diklat yang terancang baik, peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menunjang pendidikan dan latihan yang non-formal sangat penting, karena kemampuan pemerintah sangat terbatas untuk melaksanakannya. Investasi dalam sumber daya

manusia juga merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi persaingan, karena sumber daya manusia akan dapat meningkatkan proses industrialisasi dan kita tidak lagi hanya tergantung pada sumber daya dari luar negeri, karena penggunaan sumber daya manusia dari luar negeri merupakan pemborosan bagi devisa kita, maka sejauh mungkin hal ini perlu dikurangi dengan cara meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Berbagai jenjang pelatihan dapat dilakukan dengan berpijak pada pengetahuan dasar yang dimiliki melalui pendidikan formal. apabila kiat dapat menggolongkan TKI kedalam berbagai kelompok latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, maka dapat diperoleh matriks sebagai berikut ini:

TABEL 2. Jenis Pekerjaan Yang Membutuhkan Pendidikan Dan Pelatihan Tertentu

Latar Belakang Pend. Formal	Kebutuhan Pelatihan Keterampilan	
	Perlu Pelatihan	Tidak Perlu Pelatihan
Tamat SMP	a	d
Tamat SMA	b	e
Diploma/ Sarjana	c	f

Setiap sel diatas tentu mempunyai tingkat kemampuan maksimal yang berbeda secara mendasar, sehingga program dan strategi pemanfaatannya juga tidak bias digeneralisasi. bagi kelompok A. yakni mereka yang tidak tamat SMP namun dalam meniti karirnya memerlukan pelatihan yang menentukan tingkat ketrampilannya, seperti misalnya buruh konstruksi, maka arah program yang perlu dikembangkan tentunya akan sangat berbeda dengan kelompok D yang umumnya bekerja sebagai pekerja domestic (rumah tangga), yang bahkan unik dalam hal gender (umumnya wanita). OLEH sebab itu, sebagai scenario dapat dikembangkan untuk memperkirakan kebutuhan pelatihan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan TKI dengan berbagai kualifikasi ini untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha. Apabila dilihat dari jalur yang bias ditempuh untuk melakukan pelatihan, maka paling tidak tersedia beberapa pilihan yang tidak terlalu sukar untuk dipenuhi dalam jangka pendek, akan tetapi mempunyai implikasi peningkatan manfaat dalam jangka panjang. berbagai contoh diantaranya adalah.

1. Pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) Dan Unit Latihan Di Perusahaan (ULP).

Departemen tenaga kerja mempunyai balai latihan kerja yang cukup banyak, yakni 150 BLK yang terbesar di seluruh Indonesia dengan daya tampung sekitar 200.000 siswa per tahun (Swasono, 1994). Irinisnya, BLK yang terbesar dan memiliki peralatan canggih ini ternyata cukup lama mengangsur dalam satu tahun, terkadang mencapai sekitar enam bulan, karena menunggu dana dan pencairan dari anggaran belanja departemen. Padahal, peralatan yang dimilikinya cukup canggih dan bahkan lembaga pelatihan swasta tidak mampu memilikinya.

2. Penciptaan Inkubator Bekerja Sama Lembaga Pelatihan Swasta

Pemanfaatan fasilitas latihan yang tersedia di atas dapat dilakukan dengan menyewakan BLK selama periode ia tidak digunakan kepada unit usaha swasta yang memerlukannya. Dana dari inkubator yang tersedia dapat dipakai untuk merekrut tenaga pelatih handal (kalau perlu TKA) maupun untuk pemeliharaan peralatan agar sesuai dengan teknologi baru yang terus berkembang, tanpa harus menunggu dana dari pemerintah. Inkubator semacam ini merupakan hal yang lumrah dilakukan di berbagai negara berkembang lainnya, dan merupakan sumber pasokan tenaga kerja siap pakai yang sangat dinanti oleh unit usaha swasta, sebagai alternatif pemasangan yang sering terhambat karena keterbatasan dana untuk menyediakan peralatan yang khusus dipakai untuk latihan ketrampilan.

3. Pemanfaatan Sumber Dana Yang Tersedia

Berdasarkan keputusan presiden R.I. no 23 tahun 1974 tentang pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, yang secara terperinci diterjemahkan dalam SK menteri tenaga kerja warga negara asing pendatang maka ditetapkan bahwa berbagai jenis TKA yang terbuka dan tertutup bagi 20 sektor perekonomian. Dengan melandaskan pada instruksi presiden R.I. no: 15 tahun 1981 tentang petunjuk penggunaan iuran wajib pendidikan dan latihan, maka setiap departemen sejak tahun 1983 telah melaksanakan berbagai jenis diklat IWPL di berbagai sector ekonomi, yang dalam kuantitas sudah cukup banyak. Mungkin dapat dipertimbangkan untuk menggunakan sebagian tenaga IWPL ini untuk melatih TKI di sector informal atau yang kembali dari luar negeri, yang akan dikembangkan untuk

mengisi jabatan dan pekerjaan tertentu yang belum tentu terkait dengan usaha mengisi jabatan yang saat ini masih diisi oleh TKA, seperti misalnya pendirian usaha kecil dan industri rumah tangga.

4. Pembenahan Kurikulum Dan Muatan Pelatihan

Pembenahan kurikulum pendidikan yang mengandung latihan praktek sangat membantu mempersiapkan tenaga profesional yang kompeten. Namun, isu terpenting dalam pelatihan adalah kurikulum yang tepat guna berdasarkan analisa mendalam mengenai kebutuhan lapangan kerja.

4. Pemanfaatan Keterkaitan Pengusaha Kecil Dan Besar Untuk Desain Kurikulum

Sukses Jepang, Taiwan dan Korea dalam memanfaatkan dan efisiensi jaringan keterkaitan perusahaan besar dan kecil didalam memasok kebutuhan komponen perusahaan besar merupakan hal yang fenomenal. Berbagai program mulai bantuan teknis, bantuan pemasaran, maupun hubungan pembeli-pemasok yang klasik, menggambarkan perspektif hubungan tanpa komitmen yang mendasar terhadap teknologi dan ketrampilan pengusaha kecil. Di lain pihak, hubungan sub-kontraktor lebih mencerminkan adanya perspektif jangka panjang yang menyangkut interaksi substansial antara perusahaan besar dan kecil. Bentuk keterkaitan teknis bias sederhana dan low (misalnya terbatas pada pengadaan produk yang dispesifikasi dan bantuan pengawasan); menengah atau medium (seperti misalnya bantuan proses produksi bersama). Salah satu contoh klasik adalah pengusaha kecil (kurang dari 20 pekerja) pemasok beberapa komponen sepeda untuk perusahaan multi nasional yang men ekspor sebagian besar produknya, seperti yang diteliti oleh Farid Harionto (1992); maupun pengusaha kecil pemasok komponen elektronik seperti yang diteliti oleh Goeltom-Siregar (1994) dalam kedua penelitian tersebut terangkat masalah yang sangat kecil dilihat dari permukaan, namun berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup pengusaha kecil yang sangat tergantung terhadap pesanan dari pengusaha besar. Misalnya, komplikasi yang timbul akibat fixed cost contract, dimana setiap sub-kontraktor menanggung sendiri resiko kesalahan perhitungan biaya. Di lain pihak, apabila memasukkan struktur biayanya ditambah dengan tingkat keuntungan yang wajar untuk dinegosiasikan, maka perlu keahlian negosiasi serta pengetahuan mengenai

perhitungan biaya dengan benar. Ini berarti, program sederhana untuk mengajarkan cara menghitung biaya serta ketrampilan negoisasi merupakan sumbangan yang sangat berharga terhadap pengusaha kecil untuk tetap survive. dalam bentuk yang lebih mendasar lagi misalnya, kemampuan pengadaan tenaga teknis trampil (technical skilled labor) untuk memenuhi kebutuhan industry manufaktur yang bertumbuh pesat harus diimbangi dengan perbaikan kurikulum pendidikan secara mendasar, dimana muatan pengetahuan matematika serta ilmu logika perlu diberikan, agar para pekerja mudah dan dapat dilatih untuk menggunakan teknologi informasi mutakhir. Ini berarti kurikulum pendidikan fakultas teknik, STM, fakultas ekonomi dan akutansi harus disempurnakan secara berkesenambungan, karena ilmu dan teknologi itu sendiri tumbuh dengan pesat. kompensasi. bersamaan dengan itu, perbedaan gaji terus melebar sehingga akan menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti yang dialami berbagai negara saat ini, dimana insentif untuk meningkatkan investasi pendidikan dan uprading pelatihan akan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Jelas bahwa peningkatan kompetensi profesi bukan hanya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, akan tetapi juga akan memperbaiki pemerataan pendapatan sehingga memungkinkan terciptanya *sustainable development*.

DAFTAR PUSTAKA

- BANK INDONESIA & IMF.(1996). Informasi dari salah satu Direktur Bank Sentral Filipina pada 'Confrence on Macroeconomic issues facing the ASEAN countries' , Jakarta 7-8 november 1996, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan IMF Washington.
- Harianto, F. (1992). *Study on subcontracting in Indonesia Domestic firms*, mimeo, Inter-University Center, Faculty of Economics University of Indonesia.
- Hasibuan, S. (1994). *Strategi pelatihan nasional untuk meningkatkan produktivitas kerja*, Seminar Nasional ISEI mengenai keternagakerjaan, Palembang, 23-25 Juni 1994.
- Hill, H. (1995). "Indonesia's Great Leap Forward? Technology Development and Policy Issues", *Bulletin of Indonesia Economic Studies* , Vol.31 No2, hal.83-123.

- Lawrence F.Katz.(1996). *Reflections on globalization, technological change and the labor market*, makalah disajikan pada The Aspen Institute Program of the World Economy on Change and prosperity, Aspen, Colorado, 17-21 Agustus.
- Simanjuntak, D .& Siregar, M.G. (1994). "Perolehan Kemampuan Teknologi Pada Tingkat Bisnis: Persoalan-Persoalan Kunci dalam Manajemen Stratejik", dalam buku *Prospek Perekonomian Indonesia 1994*, LP-UI, Jakarta.
- Siregar, M.G.(1995). *Transnational Corporations and Backward Linkages in Asian Electronics Industries*, "CH IV: Indonesiav ESCAP/UNCTAD Joint Unit on Transnational Corporaation".